

**LAPORAN KINERJA  
PEJABAT STRUKTURAL  
ESELON III  
BAGIAN HUKUM  
DAN PERSIDANGAN  
TAHUN 2020**

**KOTA BLITAR**



**SEKRETARIAT DPRD KOTA BLITAR**

# BAB I

## PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan selain untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Hukum dan Persidangan terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam laporan kinerja Tahun 2020 ini disajikan beberapa kondisi baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja Bagian Hukum dan Persidangan.

Bagian Hukum dan Persidangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Hukum dan Persidangan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD Kota Blitar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor : 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Blitar melaksanakan tugas :

1. Perumusan kebijakan di Bagian Hukum dan Persidangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Sekretaris DPRD ;
2. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas bidang legislasi, fasilitasi produk hukum dan risalah;
3. Penyusunan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan di Bagian Hukum dan Persidangan;
4. Pengelolaan teknis dan administrasi kegiatan rapat-rapat dan kunjungan kerja/ peninjau DPRD;
5. Pengelolaan teknis dan administrasi kegiatan penyusunan risalah rapat-rapat, laporan kegiatan kunjungan kerja/ peninjauan DPRD, kegiatan Pimpinan dan Komisi, kegiatan pengembangan Sumber Daya manusia (SDM) bagi anggota DPRD;
6. Pengelolaan koordinasi dan konsultasi kepada pihak-pihak terkait kelancaran kegiatan DPRD;
7. Penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan sekretariat DPRD;
8. Penyelenggaraan pelayanan data, informasi dan dokumentasi produk hukum;
9. Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi penyusunan Naskah Akademik;
10. Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi analisis produk penyusunan perda;

11. Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi mengumpulkan bahan penyiapan draf perda inisiatif;
12. Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pembahasan perda;
13. Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat pembahasan perda;
14. Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi daftar inventaris masalah (DIM );
15. Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan tugas bidang persidangan, fasilitasi produk hukum dan risalah;
16. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di Bagian Hukum dan Persidangan;
17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB II

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Bagian Hukum dan Persidangan dengan Sekretariat DPRD Kota Blitar adalah sebagai berikut :

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	100 %

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN (Sumber Dana)
14.	<b>PROGRAM PENINGKATAN FASILITASI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH</b>	<b>11.518.400.642,00</b>	DAU
14.01.	Fasilitasi Pembahasan rancangan peraturan daerah	5.487.566.042,00	DAU
14.02.	Fasilitasi Penunjang Kegiatan dan Kinerja DPRD	6.030.834.600,00	DAU
	<b>TOTAL</b>	<b>11.518.400.642,00</b>	DAU

#### B. Capaian Kinerja

Berikut Capaian Kinerja Bagian Hukum dan Persidangan dengan Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2020.

**Tabel 2.1**  
**Capaian Kinerja Bagian Hukum dan Persidangan**

Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah	100 %	80,98%	80,98



Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1. Terfasilitasinya Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda	1. Jumlah fasilitasi pembahasan Raperda	8 Raperda dan 5 Raperda Inisiatif	3 Raperda dan 2 Raperda Inisiatif	38,46
	2. Jumlah fasilitasi Perjalanan Dinas Bapemperda/ Pansus	5 fasilitasi	5 fasilitasi	100
2. Terfasilitasinya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	1. Jumlah fasilitasi Bimtek/ workshop anggota DPRD	6 fasilitasi	6 fasilitasi	100
	2. Jumlah anggota DPRD yang melakukan medical cek up	25 orang	0 orang	0
	3. Jumlah Buku Bacaan dan Buku Peraturan Perundang-undangan	50 buku	50 buku	100
3. Terlaksananya fasilitasi penunjang kegiatan DPRD	Jumlah fasilitasi penunjang kegiatan DPRD	3 fasilitasi	3 fasilitasi	100
4. Terlaksananya kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah bagi anggota DPRD yang terfasilitasi	Jumlah fasilitasi anggota DPRD yang melakukan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	25 koordinasi	25 koordinasi	100
5. Terselenggaranya fasilitasi kegiatan rapat paripurna istimewa	Jumlah rapat paripurna istimewa yang terfasilitasi	2 fasilitasi	1 fasilitasi	50
6. Tersusunnya dokumen profil kinerja DPRD dan dokumen laporan kinerja tahunan DPRD	Jumlah dokumen profil kinerja DPRD dan dokumen laporan kinerja tahunan DPRD yang tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100

Tabel 2.2

## Cost per Outcome Bagian Hukum dan Persidangan

No	Kinerja / Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%) (%KINERJA:% CAPAIAN ANGGARAN*100)
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	T	R	%	
	Meningkatnya Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah				100%	80,98%	80,98	
I	Program Peningkatan Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah		11.518.400.642	8.816.025.812	76,54			80,98	105,80
1	Terfasilitasinya Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda	1. Jumlah fasilitasi pembahasan Raperda  2. Jumlah fasilitasi perjalanan Dinas Bapemperda/ Pansus				8 Raperda dan 5 Raperda Inisiatif  5 fasilitasi	3 Raperda dan 2 Raperda Inisiatif  5 fasilitasi	38,46  100	

No	Kinerja / Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi (%) (%KINERJA:% CAPAIAN ANGGARAN*100)
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	T	R	%	
2	Terfasilitasinya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	1. Jumlah fasilitasi Bimtek/ workshop anggota DPRD				6 fasilitasi	6 fasilitasi	100	
		2. Jumlah anggota DPRD yang melakukan medical cek up				25 orang	0 orang	0	
		3. Jumlah Buku Bacaan dan Buku Peraturan Perundang-undangan				50 buku	50 buku	100	
	Kegiatan Fasilitasi Pembahasan Rancangan Perda		5.487.566.042	3.519.570.869	64,14			67,69	105,53
3	Terlaksananya fasilitasi penunjang kegiatan DPRD	Jumlah fasilitasi penunjang kegiatan DPRD				3 fasilitasi	3 fasilitasi	100	